

- 02** GOVERNMENT TODAY
RI Urutan 7 Ekonomi Terbesar Dunia, tapi Pertumbuhan Diramal Stagnan 5,1%
- 05** PILKADA
Penolakan Percepatan Pelantikan Kepala Daerah Mencuat
- 08** FAMILY
Gizi Belalang & Ulat Sagu Alternatif Menu di MBG?

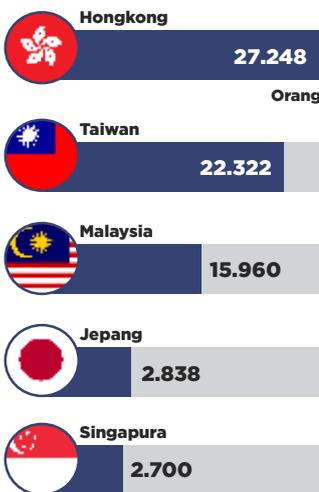


Cuaca Ekstrem di Indramayu, Tembok Penahan Ombak Jebol

Pesisir utara Jawa Barat, tepatnya di Indramayu, mengalami cuaca ekstrem berupa gelombang tinggi. Gelombang lebih dari tiga meter tersebut merusak sejumlah rumah warga dan tembok penahan ombak. Akibatnya, ratusan hunian terendam banjir rob. Anggota kepolisian Polres Indramayu berusaha menumpuk batu tembok yang jebol akibat hantaman ombak di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, pada Rabu pagi (29/1/2025). (ist.antara)

5 NEGARA DENGAN PENEMPATAN PMI TERBANYAK

Berdasarkan Negara Penempatan, Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin



5 PROVINSI ASAL PMI TERBANYAK

Berdasarkan Provinsi Asal, Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin



PENEMBAKAN WNI DI MALAYSIA PUNCAK GUNUNG ES PEKERJA MINGRAN ILEGAL

Kabar mengejutkan datang dari Negeri Jiran. Sebanyak 5 Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga merupakan Tenaga Kerja Indonesia/Pekerja Mingran Indonesia (TKI/PMI) ilegal ditembak Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM). Akibatnya, satu orang dari Riau meninggal dunia. Jenazah tiba di Terminal Cargo Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Riau, pada Rabu (29/1/2025), sekitar pukul 16.00 WIB. Sementara, 4 lainnya yang merupakan warga Aceh mengalami luka-luka. Diketahui penembakan terjadi Jumat (24/1/2025) saat para PMI yang berjumlah 26 orang hendak keluar dari Malaysia secara tidak resmi menggunakan boat. Di tengah perjalanan, boat yang mereka tumpangi dikejar kapal patroli APMM. Atas peristiwa itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia juga telah mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia untuk mendesak penyelidikan lebih lanjut. Penembakan ini hanyalah sebuah puncak gunung es persoalan PMI ilegal hingga sindikat penyelundupan orang. Menurut data Migrant Care, setidaknya 75 PMI telah meninggal selama 20 tahun terakhir. Pemicunya, diduga extrajudicial killing atau pembunuhan oleh aparat tanpa proses peradilan di Malaysia.

Baca Hal 11....

Ket : Bulan Januari - Maret 2024 ; PMI (Pekerja Mingran Indonesia)
Sumber: Pusdatin BP2MI diolah Pusdatik Kemnaker; Data ditarik pada 1 April 2024



RI Urutan 7 Ekonomi Terbesar Dunia, tapi Pertumbuhan Diramal Stagnan 5,1%

JAKARTA- Peringkat Indonesia naik dalam jajaran negara dengan ekonomi terbesar dunia. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) mencatat, peringkat Indonesia meningkat ke posisi 7 dengan ekonomi terbesar dunia pada Januari 2025 ini.

Di sisi lain, IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia di tahun 2025 dan 2026 akan tumbuh sebesar 5,1 persen secara tahunan. Angka tersebut masih sama dengan proyeksi IMF pada periode Oktober 2024 lalu.

Adapun menyitir data World Economic Outlook (WEO) Update yang dirilis pada Januari 2025, pertumbuhan ekonomi global pada 2025 dan 2026 diproyeksikan sebesar 3,3 persen atau di bawah rata-rata historis pada 2000 hingga 2019 sebesar 3,7 persen.

“Perkiraan untuk tahun 2025 secara umum tidak berubah dari perkiraan World Economic Outlook (WEO) pada bulan Oktober 2024,” demikian tertulis dalam laporan IMF, dikutip Rabu (29/1/2025).

IMF menyatakan perekonomian global tetap stabil, meskipun tingkat pengaruhnya bervariasi antar negara. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) global pada kuartal III tahun 2024 tercatat 0,1 poin di bawah perkiraan WEO pada periode Oktober 2024.

Di kawasan Asia, IMF memprediksikan pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan, tetapi lebih rendah dari perkiraan pada Oktober 2024. Pertumbuhan ekonomi Arab Saudi, menurut catatan IMF, direvisi ke bawah sebesar 1,3 poin menjadi sebesar 3,3 persen secara tahunan pada 2025. Hal ini seiring adanya perpanjangan pengurangan produksi Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC+). Meski begitu, pertumbuhan ekonomi Arab Saudi diproyeksikan sebesar 4,1 persen di tahun 2026.

Di China, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2025 sebesar 4,6 persen secara tahunan. Angka tersebut direvisi ke atas 0,1 poin dibandingkan proyeksi pada Oktober 2024 yang sebesar 4,5 persen. Sementara pada 2026, pertumbuhan ekonomi China diproyeksikan sebesar 4,5 persen secara tahunan. Sementara itu, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi India akan solid sebesar 6,5 persen pada tahun 2025 dan 2026. Angka ini sesuai dengan prediksi pada Oktober 2024, dan sejalan dengan potensi India.

Adapun di regional Eropa, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan meningkat, namun dengan laju yang bertahap. Hal ini disebabkan adanya sentimen berupa



Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi menyaksikan pertukaran MoU di bidang perdagangan, investasi, pariwisata, kesehatan, energi, kerja sama keamanan, AI (kecerdasan buatan), digital IT dan energi, Sabtu (25/1/2025). Ist

ketegangan geopolitik. Pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa diprediksikan sebesar 1,0 persen pada 2025, atau menurun 0,2 poin dari proyeksi IMF pada Oktober 2024 lalu. Sementara pada 2026, Eropa diproyeksikan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 1,4 persen secara tahunan. Angka pertumbuhan pada 2026, menurut laporan IMF, ditopang oleh permintaan domestik yang lebih kuat, kondisi keuangan yang melonggar, dan ketidakpastian yang diperkirakan akan berkurang.

Sementara di Amerika Serikat, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2025 akan berada di angka 2,7 persen. Angka tersebut lebih tinggi 0,5 poin dari proyeksi pada Oktober 2024.

Kualitas Pertumbuhan Lebih Penting

Peningkatan posisi Indonesia di jajaran negara dengan ekonomi terbesar dunia berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) yang disesuaikan dengan paritas daya beli (PPP). Sebelumnya pada 2024

Indonesia berada di peringkat ke 8 ekonomi terbesar dunia.

Meski demikian, Ekonom Center of Reform on Economic atau CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyampaikan, sejalan dengan proyeksi IMF tersebut, yang perlu diperhatikan pemerintah kualitas dari pertumbuhan PDB Indonesia.

Pasalnya, kata Yusuf, angka ketimpangan di Indonesia masih relatif tinggi sehingga angka PDB yang mengukur secara agregat tersebut belum bersifat inklusif untuk semua kelompok golongan.

“Serta upaya untuk menurunkan tingkat ketimpangan, saya kira juga merupakan upaya untuk mempertahankan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang,” tutur Yusuf, Rabu (29/1/2025).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka ketimpangan pendapatan penduduk Indonesia atau gini ratio makin melebar. Pada bulan September 2024 angkanya meningkat menjadi 0,381, dari Maret 2024 yang sebesar 0,379. Nah, semakin tinggi nilai gini ratio, maka semakin tinggi

ketimpangan.

Adapun bila berbicara terkait peringkat, Yusuf menilai peringkat Indonesia berdasarkan perhitungan IMF bisa meningkat. Syaratnya, harus meningkatkan struktur PDB itu sendiri.

Struktur PDB terdiri dari tiga lapangan usaha terbesar yang menyumbang terhadap total PDB. Mulai dari industri manufaktur, pertanian dan perkebunan serta perdagangan.wid,rls,ist/dya)

Ekonomi Terbesar Dunia Versi IMF Per Januari 2025

- 1.China dengan PDB senilai US\$ 39,44 triliun.
- 2.Amerika Serikat (AS) dengan PDB senilai US\$ 30,34 triliun.
- 3.India dengan PDB sebesar US\$ 17,36 triliun.
- 4 Rusia dengan PDB sebesar US\$ 7,13 triliun.
- 5 Jepang dengan PDB sebesar US\$ 6,77 triliun.
- 6.Jerman dengan PDB sebesar US\$ 6,17 triliun.
- 7.Indonesia dengan PDB sebesar US\$ 4,98 triliun.

Surat Perintah Sri Mulyani: Efisiensi 16 Pos Belanja

MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja

“Dalam surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dikutip di Jakarta, Selasa, Menkeu menyatakan surat tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

Lewat Inpres itu, Presiden Prabowo Subianto meminta K/L untuk mengefisienkan anggaran hingga Rp256,1 triliun.

Guna mengakomodasi arahan tersebut, Sri Mulyani menetapkan 16

pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

Dikutip Rabu (29/1/2025), pos belanja alat tulis kantor (ATK) diminta untuk diefisienkan sebesar 90 persen; kegiatan seremonial 56,9 persen; rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen; kajian dan analisis 51,5 persen; diklat dan bimtek 29 persen; serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen.

Kemudian, percetakan dan souvenir 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen; lisensi aplikasi 21,6 persen; jasa

konsultan 45,7 persen; bantuan pemerintah 16,7 persen; pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen; perjalanan dinas 53,9 persen; peralatan dan mesin 28 persen; infrastruktur 34,3 persen; serta belanja lainnya 59,1 persen.

Untuk mekanismenya, menteri/pimpinan lembaga dapat melakukan identifikasi rencana efisiensi sesuai persentase yang telah ditetapkan. Efisiensi itu mencakup belanja operasional dan non-operasional.

Sri Mulyani menegaskan identifikasi rencana efisiensi itu tidak termasuk belanja pegawai dan bantuan sosial.(wid,rls,ist/dya)

DPR Kritik Serangga Jadi Menu MBG

JAKARTA - Sejak ditegaskan mulai 6 Januari 2025 program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan banyak pihak. Terbaru DPR RI mengkritik wacana Badan Gizi Nasional (BGN) menjadikan serangga sebagai menu alternatif.

Anggota Komisi X DPR Alifudin menilai semestinya BGN tetap mengutamakan pendidikan gizi yang seimbang, alih-alih mengusulkan serangga jadi menu makan bagi pelajar.

"Pendidikan tentang pentingnya asupan gizi yang beragam dan seimbang jauh lebih penting," katanya dalam keterangannya, Rabu (29/1/2025).

Dia juga mengingatkan agar program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto ini tidak menimbulkan masalah kesehatan baru, jika serangga menjadi menu dari program tersebut. Sebab, ujar dia, tidak semua serangga bisa dikonsumsi.

"Beberapa jenis serangga mengandung racun atau patogen yang dapat membahayakan kesehatan, terutama jika tidak diproses dengan benar," ucap politikus PKS ini.

Dia mengatakan bahwa pemerintah harus mengkaji lebih dalam wacana serangga menjadi pilihan menu di program makan bergizi gratis. Alifudin menyinggung kebiasaan makan setiap anak-anak yang berbeda-beda.

Menurut dia, BGN perlu memerhatikan psikologis dan preferensi anak-anak penerima makan bergizi gratis dalam menyikapi usulan tersebut. "Ada yang sudah terbiasa makan serangga di beberapa daerah, tapi banyak juga yang merasa jijik dan tidak mau memakannya," kata dia.

Selain berfokus pada aspek psikologis dan preferensi, BGN juga perlu menyosialisasikan kepada para pelajar perihal serangga yang aman dikonsumsi. Menurut dia, pengenalan serangga sebagai lauk dalam program makan bergizi gratis itu harus dilakukan dengan pendekatan edukatif. "Bukan hanya sebagai solusi instan," ucapnya.

Wacana serangga berpeluang menjadi menu alternatif makan bergizi gratis pertama kali disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana. Dia menyatakan ada kemungkinan seporsi menu makan bergizi gratis bisa menggunakan serangga yang dapat dikonsumsi. Sebab, kata dia, beberapa serangga



(Ilustrasi) Petugas menyiapkan menu makanan untuk program MBG. (ist)

bisa diolah dan menjadi alternatif untuk pemenuhan kebutuhan protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Dadan dalam pemaparannya di Rapimnas Perempuan Indonesia Raya, Jakarta pada Sabtu (25/1/2025).

Tak hanya protein, dia mengatakan bahwa pemenuhan karbohidrat juga bisa digantikan dengan bahan baku lain, sehingga tidak harus nasi. Di sejumlah daerah tanah air, ujar dia, pemenuhan karbohidrat bisa berasal dari jagung, singkong, pisang rebus, ataupun sagu yang menjadi kesukaan masyarakat Indonesia Timur. "Kami

bisa mulai diversifikasi pangan. (Menu) tidak harus sama," ucap Dadan.

Terlebih lagi, kata dia, lembaganya tidak menetapkan menu dalam program MBG secara nasional. Dia berujar bahwa menu makan gratis akan menyesuaikan potensi sumber daya ataupun kesukaan tiap-tiap daerah.

Dadan menuturkan bahwa nantinya di tiap satuan pelayanan program ini, BGN bakal merekrut ahli gizi. Tujuannya, kata dia, untuk menyusun menu lokal yang berbasis dengan potensi sumber daya ataupun kesukaan di masing-masing daerah. (din, rls, ant/dya)

JUMLAH NEGARA YANG PUNYA KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS (berdasarkan kawasan)

.....
Europa-Asia Tengah

53 Negara

Afrika Sub-Sahara

48 Negara

Amerika Latin-Karibia

37 Negara

Asia Timur-Pasifik

32 Negara

Timur Tengah-Afrika Utara

19 Negara

Asia Selatan

8 Negara

Amerika Utara

3 Negara

Sumber : Laporan The State of School Feeding Worldwide 2022

Bantuan Rp 500 Juta/UMKM Harus Diawasi

DI SISI LAIN, pemerintah berencana memberikan permodalan Rp 500 juta bagi UMKM mitra Badan Gizi Nasional (BGN) yang terlibat dalam program makan bergizi gratis.

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendukung pemberian modal awal bagi UMKM. Menurutnya ini adalah bentuk konkrit afirmasi dan keberpihakan pemerintah kepada pebisnis UMKM.

Dengan begitu, vendor MBG ini nantinya tidak hanya dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan besar.

"Anggaran untuk pelaksanaan MBG ini sangat besar. Karena itu, manfaatnya harus dirasakan semua pihak. Termasuk dalam memberdayakan ekonomi kecil dan menengah," ujar Saleh, Rabu (29/1/2025).

Walau demikian, Saleh menekankan penyaluran pendanaan ini perlu pengawasan ketat.

Tak hanya itu, saat modal ini diberikan masyarakat diharap turut aktif mengawasi seluruh UMKM yang terlibat untuk memastikan seluruh makanan yang terdistribusi memenuhi standard gizi yang telah ditentukan.

"Jika ada yang dinilai kurang, dapat menyampaikan ke pihak pemerintah atau langsung kepada pihak UMKM-nya," pungkasnya.

Sebelumnya, rencana pengucuran modal awal Rp 500 juta bagi UMKM itu disampaikan langsung oleh Menteri U M K M Maman Abdurrahman. Maman menjelaskan bahwa pendanaan ini akan berasal dari bank yang bekerja sama dengan pemerintah.

"Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp500 juta untuk membantu

UMKM membeli bahan baku," ujar Maman dalam keterangan resminya.

Menurut data Kementerian UMKM, Maman mencatat bahwa sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner ada di Indonesia, dengan 49 persen di antaranya merupakan perempuan.

Selain itu, terdapat 30.900 UMKM jasa katering yang memiliki potensi untuk terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Saat ini, Maman mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan pengadaan 30 ribu titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia.

Untuk itu, kerja sama dengan kaum muda, pengusaha, dan pelaku UMKM sangat dibutuhkan guna membangun ekosistem usaha, dengan tujuan agar program ini memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. (wid, rls, ant/dya)

Peringatan BMKG: Cuaca Ekstrem Makin Tak Terkendali

JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan, laju pemanasan global semakin cepat terjadi.

Berbeda dari beberapa abad lalu, laju pemanasan global masih lambat dan butuh waktu ratusan bahkan jutaan tahun. Karena itu, dia mengingatkan, perlu segera melakukan perubahan perilaku.

"Pemanasan global semakin cepat. Sebelumnya butuh waktu ratusan ribu bahkan jutaan tahun," katanya, dikutip Rabu (29/1/2025).

"Sekarang, dari tahun 1900 sampai tahun ini sudah capai kenaikan 1,5 derajat Celcius. Padahal kesepakatan dunia di Paris mengizinkan kenaikan 1,5 derajat Celcius tapi nanti di tahun 2100," tambah Dwikorita.

Akibatnya, kata dia, bencana hidrometeorologi akan semakin sering terjadi.

"Karena siklus hidrologisnya semakin kencang, sehingga cuaca ekstrem semakin sering terjadi. Durasinya makin panjang, intensitasnya makin kuat, dan bencananya terjadi tidak hanya skala lokal tapi juga global," tutur Dwikorita.

Saat menyampaikan paparan kunci dalam webinar "Resolusi 2025: Mitigasi Bencana Geologi" yang ditayangkan kanal Youtube Teknik Geofisika ITS, 17 Januari 2025, Dwikorita membeberkan data Badan Meteorologi PBB (WMO), di mana tahun 2024 tercatat menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah pengamatan, melampaui tahun 2023.

Disebutkan, secara rata-rata, sepanjang Januari-September 2024, suhu sudah memiliki anomali sebesar 1,54 plus minus 0,13 derajat Celcius, di atas rata-rata praindustri tahun 1850-1900.

Selain itu, dalam 10 tahun terakhir (2015-2024), tercatat sebagai periode 10 tahunan terpanas yang pernah tercatat dalam 175 tahun pengamatan.

"Diprediksi di tahun 2030, (data 2019), kenaikan suhu akan meningkat 0,5 derajat Celcius. Ternyata prediksi ini sudah terlampaui," sebut Dwikorita.

Dalam Proyeksi Perubahan Iklim Indonesia tahun 2020-2030 yang diberikannya, di masa mendatang, curah hujan pada musim kemarau akan semakin berkurang sampai 20%. Musim kemarau akan terasa lebih



Sejumlah polisi mengatur lalu lintas kendaraan yang tersendat akibat banjir di Jalan Tol Sedyatmo, Cengkareng, Jakarta, Rabu (29/1/2025). (ant)

panas dan kering.

"Kejadiannya hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Terjadi kenaikan curah hujan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hujan ekstrem semakin sering terjadi," paparnya.

"Terjadi juga kenaikan penurunan curah hujan di saat musim kemarau. Jadi musim

kemarau makin kering, musim hujan makin basah, pokoknya makin ekstrem. Ini prediksi yang dilakukan BMKG," jelas Dwikorita.

Krisis Pangan Mengintai

Di saat bersamaan, Dwikorita menambahkan, Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO) juga memprediksi, dunia akan mengalami

krisis pangan di kisaran tahun 2050, atau berdekatan dengan target Indonesia Emas di tahun 2045.

Hal ini, terangnya, akan terjadi jika laju kenaikan suhu makin tidak terkendali.

"Di masa Indonesia Emas atau di pertengahan abad, kalau perilaku kita tidak berubah, tetap mempertahankan energi fosil, tidak berubah ke energi yang lebih ramah lingkungan, maka akan terjadi krisis pangan dunia," ujarnya.

"Hampir seluruh dunia mengalami krisis pangan. Kita nggak bisa impor beras dan bahan lainnya karena negara lainnya juga kesulitan," ucapnya.

Karena itu, lanjut Dwikorita, dengan Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, upa ketahanan pangan di Indonesia diharapkan bisa segera terwujud.

"Asta Cita ini untuk menghadapi krisis pangan agar kita terhindar dari krisis pangan," kata Dwikorita. (wid, rls, ist/dya)

Menhub Izinkan Perjalanan Transportasi **Dibatalkan**

MENTERI Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan sejumlah perjalanan transportasi bisa dibatalkan imbas cuaca ekstrem. Pembatalan perjalanan katanya boleh dilakukan demi mengutamakan keselamatan penumpang.

"Aspek keselamatan harus diutamakan dalam segala kondisi. Jika diperlukan, penundaan atau pembatalan perjalanan bisa dilakukan. Keselamatan seluruh penumpang adalah yang utama," kata Dudy dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1/2025).

Dudy mengatakan berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), cuaca ekstrem seperti angin kencang, petir, gelombang tinggi, dan banjir berpotensi terjadi hingga Kamis (30/1) besok.

Kawasan transportasi yang memiliki potensi besar mengalami cuaca ekstrem yakni Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang dan sejumlah titik penyeberangan.

Karena itu, ia menginstruksikan agar seluruh layanan transportasi

meningkatkan antisipasi terhadap cuaca ekstrem.

"Untuk itu, sebagai langkah antisipatif, saya instruksikan agar seluruh pengelola layanan transportasi dapat memperketat pengawasan pada aspek keselamatan, khususnya pada sektor transportasi udara dan penyeberangan," ujarnya.

Lebih lanjut, ia meminta agar seluruh operator serta pengelola transportasi mengecek kondisi cuaca terkini dari BMKG secara rutin. Hal ini untuk mempertimbangkan langkah yang perlu diambil menyesuaikan dengan prakiraan cuaca.

Pasalnya pada kondisi potensi cuaca ekstrem, sambungnya, perubahan cuaca dapat terjadi dalam waktu singkat.

"Selain itu, antisipasi pengalihan transportasi dan lalu lintas juga perlu disiapkan, jika terjadi pembatalan keberangkatan atau penutupan akses akibat cuaca," katanya.

Hujan lebat memang tengah mengguyur Jakarta sejak kemarin

hingga membuat sejumlah wilayah banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan sebanyak 34 RT dan 16 ruas di Jakarta terendam banjir pada Rabu (29/1/2025) siang.

Secara rinci, BPBD melaporkan terdapat 32 RT di Jakarta Barat yang terendam banjir. Ketinggian mencapai 30-100 cm.

"Kelurahan Cengkareng Barat 2 RT, Duri Kosambi 4 RT, Kedaung Kali Angke 11 RT, Rawa Buaya 4 RT dan Kelurahan Jelambar Baru 2 RT," demikian BPBD dalam keterangannya, Rabu (29/1/2025).

Lalu Kelurahan Pegadungan 1 RT, Tegal Alur 5 RT, Joglo 1 RT dan Kelurahan Cengkareng Timur 2 RT.

Kemudian dua RT di Jakarta Utara dengan ketinggian 10-80 cm. Dua RT ini yakni Kelurahan Rorotan 1 RT dan Kelurahan Pluit 1 RT. Di Jakarta Utara, selain karena curah hujan, BPBD melaporkan banjir juga terjadi karena rob. BPBD mencatat ribuan jiwa mengungsi imbas banjir di berbagai daerah. (wid, ant, ist/dya)

Penolakan Percepatan Pelantikan Kepala Daerah Mencuat

JAKARTA-Pemerintah dan DPR telah mengambil keputusan untuk mempercepat jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah 2024. Pelaksanaan akan dilakukan secara bergelombang yang dimulai pada 6 Februari 2025. Penolakan terhadap kebijakan itupun mencuat.

"Menyikapi hal tersebut, Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati menilai sebagai tindakan membangkang. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor MK No 27/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK No 46/PUU-XXII/2024, telah memutuskan pelantikan kepala/wakil kepala daerah hasil Pilkada 2024 digelar secara serentak dan menanti proses sengketa hasil pilkada di MK usai.

Mengingat saat ini, proses sengketa hasil di MK masih berlangsung dan sesuai dengan jadwal akan berakhir pada pertengahan Maret 2025.

"Saya tentu mempertanyakan keputusan pemerintah dan DPR untuk mempercepat pelantikan secara bergelombang yang justru mereduksi desain keserentakan Pilkada yang telah ditentukan. Hal ini akan berpotensi menimbulkan gugatan kepala daerah yang masih

menjabat. Sebab, sejumlah kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020 sangat tidak sepatutnya dan menyampaikan keberatan dengan keputusan pemerintah, DPR, dan

penyelenggara pemilu yang menyepakati pelantikan secara bertahap itu," ujar Neni, Rabu (29/1/2024).

Terpotongnya masa jabatan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020 menyebabkan ketidakadilan karena di akhir masa jabatannya. Mereka akan melakukan pengorbanan

terakhir kepada rakyatnya yang tentu akan berdampak pada keberlangsungan pembangunan di daerahnya bagi yang tidak lagi menjabat di periode berikutnya. Tetapi hal tersebut terjejal karena pelantikan kepala daerah terpilih 2024.

"Ketika pemerintah dan DPR sangat terburu-buru untuk melakukan pelantikan maka tentu ini menimbulkan tanda tanya, ada kepentingan apa sampai mengorbankan kepatuhan terhadap hukum yang seharusnya putusan MK dihormati dan ditindaklanjuti. Jangan sampai ada tafsir yang logical fallacy dengan sengaja dibuat untuk memuluskan rencana tertentu. Pemerintah juga bukan hanya mengingkari putusan MK tetapi keputusan yang sudah dibuatnya sendiri terkait dengan periodisasi masa jabatan kepala



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra memimpin sidang perselisihan hasil Pilkada 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (Ist.dok)

daerah," tegas Neni.

Neni menjelaskan, artinya terdapat dua keputusan yang melanggar. Pertama, Keputusan Mendagri No 131.32-266 Tahun 2021 tertanggal 19 Februari 2021 bahwa masa jabatan bupati selama 5 tahun dan terhitung sejak pelantikan. Kedua, Putusan MK No 27/PUU-XXII/2024 yang menyatakan kepala daerah hasil Pilkada 2020 menjabat sampai dengan dilantik kepala daerah hasil Pilkada 2024 sepanjang tidak melewati 5 tahun masa jabatan.

Neni meminta kepada pemerintah,

DPR dan penyelenggara pemilu untuk dapat membatalkan putusan yang telah menyimpang tersebut dan kembali menaati konstitusi ke khittah. Neni juga mendorong kepada masyarakat jangan sampai lengah terhadap gerak politik publik yang mencurigakan.

Senada, Bupati Indramayu, Nina Agustina, merasa kecewa terhadap keputusan pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu yang sepatutnya untuk melaksanakan pelantikan kepala-wakil kepala daerah hasil Pilkada 2024 secara bertahap mulai 6

Februari 2025. Nina memprediksi bahwa keputusan ini akan menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. (din, rls, kcm, ist/dya)

Proses Pemeriksaan dan Persidangan Sengketa Pilkada oleh MK

-  **8-16 Januari 2025:** Pemeriksaan pendahuluan, meliputi pengecekan kelengkapan materi permohonan dan verifikasi bukti dari Pemohon.
-  **16 Januari - 3 Februari 2025:** Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu memberikan jawaban dan keterangan.
-  **17 Januari - 4 Februari 2025:** Pemeriksaan pendahuluan oleh MK, mendengarkan jawaban dari Termohon dan Pihak Terkait, serta memeriksa bukti.
-  **5-10 Februari 2025:** Panel Hakim rapat permusyawaratan untuk membahas laporan hasil pemeriksaan dan menyusun putusan.
-  **11-13 Februari 2025:** Pembacaan putusan atau ketetapan, memutuskan apakah gugatan dilanjutkan ke tahap pembuktian.
-  **11-15 Februari 2025:** Penyerahan salinan putusan kepada pihak-pihak terkait.

MK Tegaskan Belum Ada Putusan soal Pilkada Ulang

HINGGA saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) belum mengeluarkan putusan terkait gugatan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang sedang ditangani. Hal ini menepis anggapan yang berkembang tentang kemungkinan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa daerah.

Berdasarkan informasi yang tersedia di situs resmi MK, proses pemeriksaan dan persidangan terus berjalan sesuai jadwal. Pada periode 8-16 Januari 2025, MK telah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan, yang meliputi pengecekan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta verifikasi alat bukti dari Pemohon.

Kemudian, antara 16 Januari hingga 3 Februari 2025, giliran Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu memberikan jawaban dan keterangan. Proses pemeriksaan pendahuluan kembali berlangsung pada 17 Januari hingga 4 Februari 2025, di mana MK mendengarkan jawaban dari Termohon dan pihak terkait, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan. Selanjutnya, pada 5-10 Februari 2025, Panel Hakim akan

mengadakan rapat permusyawaratan untuk membahas laporan hasil pemeriksaan dan menyusun putusan.

Pada 11-13 Februari 2025, MK akan membaca putusan atau ketetapan, yang akan menentukan apakah proses penelitian gugatan akan dihentikan atau dilanjutkan ke tahap pembuktian lebih lanjut. Penyerahan salinan putusan kepada pihak-pihak terkait dijadwalkan pada 11-15 Februari 2025.

Selain itu, MK menegaskan bahwa sidang perselisihan hasil Pemilihan (PHP) untuk Gubernur, Bupati, dan Walikota 2024 tetap berjalan secara proporsional dan tepat waktu sesuai tenggat waktu 45 hari kerja yang ditetapkan dalam Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024.

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi, Pan Mohamad Faiz, mengungkapkan bahwa pengucapan putusan untuk sengketa Pilkada dijadwalkan berlangsung pada 7-11 Maret 2024.

"Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 56 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa putusan harus keluar dalam

waktu maksimal 45 hari kerja setelah permohonan terdaftar," katanya, dikutip Rabu (29/1/2025).

MK diminta hati-hati dalam memutuskan gugatan terkait hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Sebab, hasil putusan persidangan MK harus menjadi akhir dari sengketa di pilkada.

"Saya berharap apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi akhir dari sengketa para pihak. Oleh karena itu, MK harus hati-hati dalam memutus karena putusan apa pun yang dihasilkan oleh MK harus diterima para pihak," kata pengamat politik Agus Syarifudin melalui keterangan tertulis.

Irawan mengatakan MK memiliki pengalaman yang panjang dalam menyelesaikan masalah sengketa hasil pemilu. Sehingga, proses penanganan perselisihan hasil Pilkada 2024 diyakini lebih baik dari sebelumnya.

"Pengalaman panjang MK membuat saya yakin dari aspek manajemen dan aspek penanganan perkara penyelesaian sengketa hasil pada Tahun 2024 harusnya lebih baik dari sebelumnya," ujar agus. (wid, rls, ant/dya)

Benarkan Dugaan Pungli Pegawainya, Kepala Dindik Kabupaten Malang: Proses Pemeriksaan

MALANG - Seorang pegawai di Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap puluhan kepala sekolah dasar (SD) negeri. Dugaan pungli ini mencuat setelah sejumlah korban melaporkan diminta untuk menyetorkan sejumlah uang kepada pejabat tersebut. Jika terbukti, terlapor berpotensi dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kepala Dindik Kabupaten Malang, Suwadji, membenarkan dugaan pungli tersebut. Dia mengatakan saat ini tengah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat.

"Saat ini untuk penanganannya sedang dilakukan oleh Inspektorat, sedang dalam proses pemeriksaan serta permintaan keterangan kepada yang bersangkutan dan seluruh kepala sekolah yang menerima program tertentu," ujar Suwadji, dikonfirmasi melalui sambungan selular, Rabu (29/1/2025).

Menurutnya, keputusan mengenai sanksi baru dapat ditentukan setelah hasil pemeriksaan rampung. Jika terbukti bersalah, pejabat tersebut akan menerima sanksi sesuai

rekomendasi Inspektorat yang nantinya akan disampaikan kepada Bupati Malang.

"Nanti Inspektorat memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada Bapak Bupati, dan Bupati yang akan menentukan sanksinya, baik itu ringan, sedang, atau berat. Jadi kami juga masih menunggu hasil pemeriksaannya," jelas Suwadji.

Meski tengah menjalani pemeriksaan, Suwadji mengungkapkan pejabat terlapor masih aktif bekerja seperti biasa. Namun, pihaknya telah memberikan teguran secara lisan sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Sementara itu diketahui, Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek), Asep Suriaman, mengatakan pihaknya telah menerima pengaduan dari sejumlah kepala sekolah SD negeri yang diduga menjadi korban pungli. Atas dasar laporan tersebut, Pusdek telah bersurat kepada Dindik Kabupaten Malang untuk meminta klarifikasi.

"Dindik juga sudah membalas surat kami pada 21 Januari 2025 lalu dan menyatakan bahwa kasus ini akan

ditindaklanjuti bersama Inspektorat," ujar Asep.

Berdasarkan pengaduan yang diterima Pusdek, Asep menyebutkan oknum Kabid SD berinisial LS diduga meminta setoran dana sebesar Rp 1 juta hingga Rp 1,6 juta kepada kepala sekolah SD negeri. Setidaknya ada puluhan kepala sekolah yang mengaku telah memberikan setoran tersebut.

"Dari pengakuan kepala sekolah, pungli diberikan saat oknum pejabat tersebut datang langsung ke sekolah mereka. Jika benar praktik ini terjadi, jelas mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Malang," tegasnya.

Asep juga menambahkan, kasus ini berpotensi masuk dalam kategori tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Suwadji. (dok. ist)

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Selain dugaan pungli, Pusdek juga mengungkap adanya indikasi monopoli proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 yang dilakukan oleh oknum LS. Dimana seharusnya proyek DAK dikelola secara mandiri oleh pihak sekolah, namun LS diduga mengarahkan proyek tersebut kepada pihak tertentu. (Santi/Dya)

15% Pedagang Belum Sepakat Pembongkaran Total Pasar Besar DPRD Kota Malang Buka Ruang Komunikasi



Ketua Himpunan Pedagang Pasar Besar Malang (Hippama) saat menandatangani kesepakatan bersama persetujuan pembangunan total Pasar Besar. (Santi/Lenteratoday)

MALANG - Rencana pembangunan kembali Pasar Besar Malang (PBM) terus bergulir, dengan mayoritas pedagang menyatakan persetujuannya terhadap rencana pembongkaran total. Namun, sekitar 15 persen diantaranya ternyata belum menyepakati metode revitalisasi tersebut.

Menanggapi hal ini, DPRD Kota Malang menegaskan komitmennya

untuk tetap membuka ruang komunikasi guna memastikan aspirasi seluruh pedagang terakomodasi.

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, mengatakan Pemkot Malang telah menandatangani kesepakatan bersama dengan 2 ketua paguyuban pedagang, yang berisi poin-poin utama terkait pembangunan total. Mulai dari tidak adanya biaya yang akan dibebankan kepada pedagang pada saat relokasi ataupun penempatan bedak kembali, hingga tidak adanya pengurangan ataupun penambahan jumlah bedak di PBM.

"Kami tetap membuka peluang komunikasi bagi pedagang yang belum sepakat. Prinsipnya, baik itu penolakan maupun keberatan, jangan sampai menghalangi pembangunan," ujarnya, Rabu (29/1/2025)

Bayu juga menegaskan, saat ini kondisi bangunan pasar legendaris tersebut sudah tidak memungkinkan untuk direnovasi. Menurutnya, hal ini sejalan dengan kajian akademisi Teknik Sipil Universitas Brawijaya (UB), yang menyatakan struktur rangka bangunan Pasar Besar Malang sudah dalam kondisi tidak stabil, rawan, dan tidak aman.

"Selain itu, ada banyak masalah lain seperti banjir, got mampet, serta instalasi listrik yang membahayakan. Oleh karena itu, pembangunan dengan skema pembongkaran total menjadi pilihan terbaik," lanjutnya.

Menanggapi kekhawatiran sebagian pedagang yang lebih memilih perbaikan total, Bayu menjelaskan rencana pembangunan kembali Pasar Besar Malang tengah diajukan untuk menggunakan dana dari pemerintah pusat.

Dengan anggaran yang diusulkan sebesar Rp 275 miliar, menurutnya pemerintah pusat menghendaki pembongkaran total sebagai syarat utama pencairan dana.

"Setiap proyek pembangunan skala besar harus memiliki landasan

akademis yang kuat. Berdasarkan kajian yang ada, pasar ini tidak bisa sekadar direnovasi, karena justru membahayakan. Inilah yang menjadi dasar keputusan untuk melakukan pembongkaran total," tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, menegaskan kesempatan revitalisasi Pasar Besar Malang melalui pendanaan pusat ini tidak boleh disia-siakan. Ia mengingatkan Pemkot Malang pernah mendapatkan peluang yang sama sebelumnya, namun gagal karena adanya penolakan dari pedagang saat itu.

Arief juga menyoroti risiko jika pembangunan total Pasar Besar kembali tertunda. Senada dengan Bayu, Arief mengingatkan kondisi pasar saat ini sangat rentan terhadap berbagai masalah keamanan dan kenyamanan.

"Kalau ada kejadian buruk di pasar ini karena kita terus menunda pembangunan, siapa yang akan bertanggung jawab? Pastinya Pemkot yang disalahkan. Maka dari itu, mari kita sepakati bersama agar pembangunan ini berjalan dengan lancar," tegasnya. (Santi/Dya)

Maskapai Air Busan Terbakar, 7 Orang Terluka

SEOUL – Sebanyak tujuh orang mengalami luka-luka dalam insiden pesawat Airbus A321, milik maskapai Air Busan, yang terbakar di Bandara Internasional Gimhae, Busan, Korea Selatan (Korsel). Penyebab kebakaran itu sedang diselidiki lebih lanjut oleh otoritas setempat.

Pesawat jenis Airbus A321 yang dioperasikan oleh maskapai Air Busan, seperti dilansir AFP, Rabu (29/1/2025), tiba-tiba terbakar pada bagian belakang badan pesawat pada Selasa (28/1/2025) malam, ketika pesawat hendak terbang dari Busan ke Hong Kong.

Kementerian Transportasi Korsel melaporkan bahwa sebanyak 169 penumpang dan tujuh awak pesawat berhasil dievakuasi melalui seluncuran darurat yang mengembang di kanan dan kiri badan pesawat.

Otoritas setempat awalnya melaporkan tiga orang mengalami luka-luka, namun kemudian merevisinya menjadi tujuh orang korban luka pada Rabu (29/1/2025) waktu setempat. Kebanyakan korban mengalami luka ringan, dengan salah satu korban luka saat ini masih dirawat di rumah sakit setempat.

Insiden kebakaran ini, menurut Kementerian Transportasi Korsel, menyebabkan hampir separuh badan pesawat hangus, kecuali bagian sayap dan mesin pesawat di kedua sisi yang tidak mengalami kerusakan.

Penyebab kebakaran saat ini sedang diselidiki secara menyeluruh oleh otoritas terkait.

"Belum jelas kapan kami bisa mengungkapkan temuan investigasi penyebab kebakaran tadi malam," kata juru bicara Kementerian Transportasi Korsel kepada AFP.

Diketahui pesawat tujuan Hong Kong terbakar di Bandara Internasional Gimhae, Busan, Korea Selatan. Ratusan penumpang termasuk awak kabin berhasil dievakuasi.

"Bagian belakang sebuah pesawat penumpang terbakar di sebuah bandara di Korea Selatan pada hari Selasa memaksa 176 orang di dalamnya dievakuasi," bunyi keterangan pihak berwenang Korsel dilansir AFP, Selasa (28/1/2025).

Pesawat yang terbakar itu diketahui Air Busan dengan jenis Airbus A321. Pesawat tersebut dijadwalkan terbang ke Hongkong dari Bandara Internasional Gimhae, Korsel,



Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar pesawat penumpang Air Busan di Bandara Internasional Gimhae, Busan, Korea Selatan, pada Selasa (28/1/2025). (Dok. AFP)

pukul 22.15 waktu setempat.

"Sebanyak 169 penumpang dan tujuh pramugari serta staf dievakuasi melalui seluncuran tiup," tulis keterangan berwenang Korsel.

Pernyataan tersebut tidak memberikan informasi mengenai penyebab kebakaran selain menyebutkan kebakaran terjadi di bagian belakang pesawat.

Badan Pemadam Kebakaran Nasional mengatakan tiga orang terluka ringan selama evakuasi. Api kemudian berhasil dipadamkan pukul 23.31 waktu setempat.

Sudah sebulan sejak bencana udara paling mematikan di tanah Korea Selatan ketika pesawat Jeju Air (089590.KS). Pesawat yang datang dari Bangkok jatuh di landasan pacu Bandara Muan saat melakukan pendaratan darurat, menewaskan semua orang kecuali dua dari 181 orang dan awak pesawat.

Tentang Air Busan

Maskapai penerbangan murah Air Busan adalah bagian dari Asiana Airlines Korea Selatan (020560.KS), yang pada bulan Desember diakuisisi oleh Korean Air (003490.KS).

Pembuat pesawat Airbus mengatakan pihaknya mengetahui laporan tentang insiden tersebut dan sedang berhubungan dengan Air Busan.

Air Busan dan Asiana tidak segera menanggapi permintaan komentar. Korean Air mengarahkan pertanyaan kepada Air Busan.

Pesawat tersebut adalah model Airbus A321ceo berusia 17 tahun dengan nomor ekor HL7763, menurut Aviation Safety Network, basis data terhormat yang dikelola oleh Flight Safety Foundation.

Dilansir KoreaHerald, didirikan

pada tahun 2007, Air Busan adalah maskapai penerbangan yang berkantor pusat di Beomcheon-dong, Busanjin-gu, Busan, Korea Selatan.

Maskapai penerbangan yang merupakan anak perusahaan Asiana Airlines ini mengoperasikan layanan ke berbagai destinasi di Asia dari pangkalannya di Bandara Internasional Gimhae.

Pada tanggal 29 September 2021, Korean Air mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima persetujuan dari Korea Development Bank (KDB) untuk rencana integrasi pasca-merger (PMI) guna mengakuisisi saham pengendali di Asiana Airlines senilai KRW1,8 triliun (USD1,5 miliar) dan selanjutnya menggabungkan kedua maskapai tersebut.

PMI tersebut mencakup ketentuan untuk menggabungkan kedua maskapai secara bertahap menjadi satu maskapai penerbangan layanan penuh dengan merek Korean Air, yang mengintegrasikan anak perusahaan LCC Korean Air, Jin Air, dengan anak perusahaan LCC Asiana, Air Seoul dan Air Busan.

Sementara itu pemilik dari Korean Air adalah perusahaan Hanjin Group yang memiliki nama Ceonya adalah Cho Won-tae. Dia merupakan orang yang terlahir dari keluarga kaya. Adapun kekayaannya mencapai Rp97 triliun. (AFP,Reuters,ist/nei)

10 Kecelakaan Pesawat Terparah dalam Sejarah Korea

TAHUN	PESAWAT	JUMLAH TEWAS
1989	Hope's Peak Airlines flight 22	299
1998	Korean Air flight 878	271
1992	Buttercup Airlines flight 671	247
1990	Korean Air flight 1316	238
2006	Getaway Air flight 111	232
2024	Jeju Air 7C 2216	179
2002	Air China flight 129	129
1993	Asiana Airlines flight 733	68
1967	Seoul C-46	69
1982	KAF C-123	53

Gizi Belalang & Ulat Sagu Alternatif Menu di MBG?

KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan bahwa menu dalam Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak ditetapkan secara oleh nasional dan bisa ditetapkan menurut potensi sumber daya di setiap daerah.

Dadan mengatakan kemungkinan dalam seporsi menu MBG menggunakan serangga yang dapat dikonsumsi dan menjadi alternatif untuk pemenuhan kebutuhan protein. "Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala BGN Dadan dalam pemaparannya di Rapimnas Perempuan Indonesia Raya (Pira) Gerindra, Jakarta pada Sabtu, (25/1/2025).

Selain itu, Dadan melanjutkan bahwa nantinya di setiap satuan pelayanan program ini, BGN akan merekrut ahli gizi yang bertujuan untuk menyusun menu lokal yang berbasis dengan potensi sumber daya maupun kesukaan di tiap-tiap daerah. Adapun BGN telah menetapkan standar komposisi gizi untuk seporsi makan bergizi gratis. Dalam sepiring menu yang akan dikonsumsi pelajar harus mengandung 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan, pihaknya memang tidak menetapkan standar menu untuk MBG karena yang diutamakan adalah nilai gizi dari makanan. "Sepertinya semua salah menangkap. Konteksnya BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tapi menetapkan standar komposisi gizi," kata Dadan kepada wartawan, Selasa (28/1/2025).

Oleh sebab itu, Dadan mengatakan dalam setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi MBG, ada ahli gizi yang akan menyesuaikan kebutuhan dari siswa daerah tersebut. "Oleh karena itu harus ada ahli gizi di setiap SPPG agar sumber potensi sumber daya lokal dan kesukaan serta kebiasaan masyarakat lokal dapat diakomodir, jika diinginkan," ucap dia. Dadan menuturkan, mengenai masalah menu belalang dan ulat sagu, tidak akan diterapkan di seluruh wilayah. Sebab, ada beberapa daerah yang memang terbiasa mengkonsumsi belalang dan ulat sagu sebagai sumber protein.

Artinya, belalang goreng dan ulat sagu ini bisa menjadi menu jika diinginkan oleh anak-anak di daerah

tertentu,

"Saya tahu, ada daerah-daerah tertentu yang biasa makan serangga sebagai sumber protein," tandasnya.

Kandungan Nutrisi Belalang-Ulat Sagu Belalang dan ulat sagu berkemungkinan menjadi salah satu serangga yang disebutkan oleh Kepala BGN sebagai alternatif pemenuhan protein dalam menu MBG. Di beberapa daerah di Indonesia, seperti Gunungkidul, belalang goreng telah menjadi makanan khas daerah tersebut. Belalang goreng ini berbahan dasar belalang jati yang dibumbui dengan garam dan rempah.

1. Nutrisi Belalang

Belalang memiliki beragam jenis varietas dan kandungan nutrisi yang penting dan baik bagi kesehatan tubuh, seperti vitamin, protein, dan mineral. Diketahui bahwa pada belalang segar, kandungan protein adalah 20 persen.

Sementara itu, pada belalang kering mengandung protein sekitar 40 persen. Tidak hanya pada daging belalang, kulit belalang pun mengandung nutrisi berupa zat kitosan yang seperti terdapat pada udang. Nutrisi lainnya yang terdapat dalam belalang adalah vitamin A dan dapat memenuhi 25 persen hingga 30 kebutuhan vitamin A.

Menurut Guru Besar Ilmu Gizi IPB, Ahmad Sulaiman, protein yang terdapat dalam belalang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan gizi.

"Protein ini sangat penting untuk pertumbuhan. Kalau tubuh kekurangan protein, penyerapan dan fungsi zat lain di dalam tubuh tidak optimal. Berkaitan dengan belalang, di Indonesia, pemanfaatannya belum digali secara maksimal supaya lebih menarik dan dapat diterima oleh masyarakat," kata Ahmad, dikutip dari laman Fakultas Teknologi Pertanian IPB

2. Nutrisi Ulat Sagu

Berbeda halnya dengan belalang, ulat sagu di beberapa daerah di Indonesia juga dijadikan sebagai santapan lokal khas daerah tersebut, seperti di Papua. Ulat sagu adalah salah satu jenis serangga yang merupakan sumber makanan bergizi yang di sisa bagian batang pohon sagu setelah pati sagu dihilangkan.

Ulat sagu adalah sumber makanan yang kaya energi dan sering dimakan mentah maupun dapat diolah dengan cara dipanggang maupun digoreng. Adapun komposisi nutrisi dari ulat sagu dalam ukuran 100 gram berat kering mengandung sekitar 25,8 gram protein, 38,5 gram lemak, 2,1 gram abu, 33,2 gram karbohidrat, dan 583 energi (kkal).

Selain mengandung kaya akan nutrisi, ulat sagu juga dikenal baik untuk pencernaan seperti mencegah

sembelit dan perut kembung. Ulat sagu kaya akan kalsium dan magnesium sehingga dapat memperkuat tulang dan gigi.

Tidak hanya itu, bagi penderita diabetes, ulat sagu dapat dikonsumsi dengan aman sebab mengandung rendah gula dan membantu menjaga kadar gula. Ulat sagu juga memberikan penghalang pelindung terhadap mikroorganisme sebab memiliki sifat antimikroba.

Potensi protein tinggi, tapi masih perlu penelitian

Meski potensi kandungan proteinnya menjanjikan, Dokter Inge menekankan perlunya kajian lebih lanjut untuk memastikan kesetaraan nilai gizi antara makanan berbasis serangga dan sumber protein lainnya. "Misalnya, satu butir putih telur mengandung sekitar 5 gram protein. Tapi, berapa banyak ulat sagu yang setara dengan jumlah protein itu? Itu harus dihitung dan dikaji lebih lanjut," jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pengolahan makanan berbasis serangga harus dilakukan secara higienis, sehat, dan bervariasi untuk memastikan keamanan, kesehatan, serta membuat orang senang untuk mengonsumsinya. (nei,ist/dya)



DEEPSEEK, AI Asal China dengan Biaya Rendah

DEEPSEEK, sebuah produk AI large language model (LLM) dari startup China, telah dirilis pada Desember 2024 dan dengan cepat menjadi aplikasi AI gratis paling banyak diunduh di AS.

Pengembangan AI DeepSeek yang disebut memakan biaya lebih rendah telah membuat perusahaan AS dan Eropa ketakutan. Ia disebut berpotensi membuat industri AI jungkir balik.

Sejumlah perusahaan AS yang terlibat dalam pengembangan AI, mengalami penurunan harga saham dalam perdagangan Senin, 27 Januari 2025, karena klaim DeepSeek yang menyebut produknya bisa memiliki otak pintar dengan biaya yang lebih rendah.

Nvidia kehilangan lebih dari seperenam nilai sahamnya. Microsoft dan Google juga mengalami penurunan harga saham di tengah kenaikan popularitas DeepSeek.

Dalam perkembangan terpisah, DeepSeek mengatakan pada Senin 27 Januari 2025, mereka sementara ini membatasi pendaftaran pengguna baru lantaran ada "serangan siber berskala besar" ke platform mereka. Pengguna yang sebelumnya sudah daftar tetap bisa masuk dan menggunakan DeepSeek.

Yang Membuat DeepSeek Dilirik

AI LLM DeepSeek dilaporkan dikembangkan dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan para pesainnya, seperti ChatGPT dari OpenAI, lalu Gemini dari Google, Copilot dari Microsoft, hingga Meta AI dari Meta.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang masa depan dominasi AI LLM asal AS, yang terkenal memakan modal investasi sangat besar, membutuhkan data yang juga besar untuk melatih AI,

dan tentu memakan sumber daya energi super besar dalam prosesnya.

Para peneliti DeepSeek menulis dalam sebuah makalah pekan lalu, bahwa model DeepSeek V3, yang dibangun secara open source dan diluncurkan pada 10 Januari 2025, memanfaatkan chip AI Nvidia H800. Ia termasuk chip kapasitas rendah dari Nvidia untuk melatih (training) AI. Peneliti berkata model AI DeepSeek V3 itu telah dilatih dengan biaya sekitar 6 juta dolar AS atau sekitar Rp 97 miliar selama dua bulan. Angka tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan miliaran dolar AS yang dikeluarkan oleh para pesaingnya untuk training AI.

Para peneliti mengatakan DeepSeek menggunakan teknologi yang sudah ada, serta kode sumber terbuka, perangkat lunak yang dapat digunakan, dimodifikasi atau didistribusikan oleh siapa saja tanpa dipungut biaya.

Tetapi, klaim tersebut diragukan oleh pihak peneliti AI yang lain. Ada pula pihak yang percaya bahwa High-Flyer, induk usaha DeepSeek, telah mampu membeli chip AI Nvidia H100 yang lebih canggih meskipun ada pembatasan ekspor AS.

Sementara DeepSeek R1, yang dirilis minggu lalu, 20 hingga 50 kali lebih murah untuk digunakan daripada model o1 milik OpenAI, tergantung pada tugasnya, menurut sebuah posting di akun WeChat resmi DeepSeek.

Startup AI China Menderita Batasan Chip AI

Kemunculan DeepSeek terjadi di tengah upaya AS membatasi penjualan chip canggih yang mendukung AI ke China. AS khawatir, startup China bakal tumbuh lebih hebat dibandingkan perusahaan asal AS dalam hal

pengembangan AI global.

Sementara itu, untuk melatih sebuah LLM AI, diperlukan data center yang siap meladeni training AI. Startup di China harus putar otak dalam mengembangkan LLM AI mereka di tengah kelangkaan chip AI di Negeri Tirai Bambu. Chip AI itu umumnya didapatkan dari Nvidia, perusahaan yang sering disebut The King of AI, karena mereka memiliki chip dengan kekuatan komputasi super besar.

Untuk melanjutkan pekerjaan tanpa pasokan chip canggih impor yang stabil, para pendiri startup AI China telah berbagi pekerjaan mereka satu sama lain dan bereksperimen dengan pendekatan baru terhadap teknologi. Hal ini termasuk kerja keras founder startup AI China untuk menghasilkan model AI yang membutuhkan daya komputasi jauh lebih sedikit daripada sebelumnya.

Dengan biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah daripada yang diperkirakan sebelumnya, itu berpotensi membuat industri AI dunia jadi jungkir balik. Tak sedikit pula pendiri startup AI China yang akhirnya memilih membangun dan melatih AI mereka di luar China demi mendapat-

kan akses pada chip AI yang hebat.

Marc Andreessen, seorang investor venture capital dari Silicon Valley, mengatakan dalam sebuah posting di X pada hari Minggu, bahwa model R1 DeepSeek adalah "momen Sputnik" dalam industri AI, merujuk pada peluncuran satelit bekas Uni Soviet yang menandai dimulainya perlombaan luar angkasa pada akhir tahun 1950-an antara AS dan Uni Soviet.

"DeepSeek R1 adalah salah satu terobosan paling menakjubkan dan mengesankan yang pernah saya lihat

— dan sebagai platform open source, ini merupakan anugerah yang sangat berarti bagi dunia," kata Marc Andreessen, Investor. (ne, ist/dya)



Barang Khas Imlek yang Penuh Makna

PERAYAAN Imlek tidak hanya menjadi momen untuk berkumpul bersama keluarga, tetapi juga dipenuhi simbol-simbol khas yang melambangkan harapan akan keberuntungan, kebahagiaan, dan kesejahteraan di tahun baru.

Barang-barang ini tidak hanya berfungsi sebagai dekorasi atau hidangan, tetapi juga memiliki makna simbolis yang dalam perayaan Imlek 2025. Di antara barang yang dijual adalah jeruk mandarin, lampion, amplop angpau, dan gantungan berbentuk lambang shio.

Setiap barang ini ternyata memiliki arti penting dalam budaya Tionghoa, yang umumnya terkait dengan harapan baik untuk tahun yang akan datang.

Dilansir dari Antara, pakar feng shui, Yulius Fang menjelaskan bahwa barang-barang tersebut melambangkan berbagai harapan positif untuk tahun baru.

"Semua penerapan ini adalah bagian

dari budaya Tionghoa, memulai tahun baru dengan hal yang baik, untuk harapan setahun ke depan yang lancar dan harmonis," jelas Yulius Fang saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Makna Barang-Barang Khas Imlek dalam Budaya Tionghoa

Terkait hal tersebut, Yulius Fang menjelaskan makna masing-masing barang yang selalu ada ketika perayaan Imlek.

1. Lampion Merah: Simbol Kebahagiaan dan Kemakmuran

Lampion bundar berwarna merah menyala yang biasa digunakan untuk menghias rumah saat Imlek melambangkan reuni keluarga, kebahagiaan, hidup yang cerah, vitalitas, kesempurnaan, kemakmuran bisnis, dan kekayaan.

Warna merah yang digunakan pada lampion ini memiliki makna keberuntungan dan energi positif, yang dipercaya dapat mendatangkan kebaikan sepanjang tahun.

2. Jeruk Mandarin: Lambang Kekayaan dan Sukses

Jeruk mandarin menjadi salah satu buah favorit yang biasa disajikan selama perayaan Imlek.

Tidak hanya menjadi suguhan, jeruk mandarin juga memiliki makna simbolis yang sangat penting.

Jeruk ini dianggap sebagai simbol kekayaan, dengan warnanya yang kekuningan mirip dengan warna emas.

Selain itu, kata "jeruk" dalam bahasa Mandarin memiliki sifat homofon, yaitu aksara Mandarin untuk jeruk adalah chéng, yang memiliki lafal yang sama dengan chéng, yang berarti sukses atau berhasil. Aksara lainnya untuk

jeruk, yaitu jú, juga hampir sama dengan jí, yang berarti beruntung.

3. Buah Apel Merah: Simbol Kedamaian dan Kebahagiaan

Selain jeruk mandarin, buah apel merah juga sering disajikan pada saat perayaan Imlek yang memiliki makna simbolis.

Dalam bahasa Mandarin, apel disebut píng gu, dengan aksara píng yang memiliki lafal yang sama dengan píng, yang berarti aman, damai, tenang, dan tenteram.

Warna merah pada apel dianggap sebagai simbol keberuntungan, energi, vitalitas, dan kebahagiaan.

4. Nanas: Simbol Kemakmuran

Selain jeruk dan apel, buah nanas juga merupakan bagian dari tradisi kuliner Imlek.

Dalam dialek Hokkien, nanas disebut "Ong Lai," yang pelafalannya hampir sama dengan wàng lái, yang berarti kemakmuran dalam bahasa Mandarin.

Ini menjadikan nanas sebagai simbol dari kedatangan kemakmuran dan keberuntungan yang melimpah.

5. Kue Keranjang dan Lapis Legit: Harapan untuk Kemakmuran dan Rezeki yang Berlipat

Kue keranjang, yang terbuat dari beras ketan dan gula, merupakan sajian khas Imlek yang melambangkan harapan untuk kemakmuran dan kesuksesan.

Dalam bahasa Mandarin, kue keranjang disebut nián gao, yang memiliki lafal yang sama dengan nián gao. Kata nián berarti tahun, dan gao berarti tinggi.

Oleh karena itu, kue keranjang dianggap sebagai lambang pendapatan yang lebih tinggi, posisi jabatan yang lebih tinggi, atau kemakmuran yang meningkat.

Selain kue keranjang, lapis legit juga menjadi hidangan khas Imlek

yang tidak boleh dilewatkan. Kue ini terdiri dari lapisan-lapisan yang dianggap sebagai simbol kelipatan rezeki.

Semakin banyak lapisan pada kue, semakin besar harapan untuk mendapatkan rezeki yang berlipat ganda sepanjang tahun.

6. Amplop Angpau

Amplop merah berisi uang, atau yang dikenal sebagai angpau, menjadi simbol berbagi berkah dan rezeki.

Amplop merah diyakini dapat mengusir energi buruk, sedangkan uang di dalamnya melambangkan harapan untuk keberuntungan finansial di masa depan.

7. Gantungan Shio

Dekorasi gantungan berbentuk shio sesuai dengan tahun kelahiran juga sering dijadikan hiasan. Gantungan ini dipercaya membawa keberuntungan dan perlindungan bagi individu berdasarkan lambang shio mereka.

8. Bunga Krisan

Bunga krisan merupakan simbol panjang umur, kekayaan, dan harapan untuk masa depan yang damai.

Bunga berwarna kuning sering dianggap sebagai lambang emas, yang mengacu pada kemakmuran.

Yulius Fang menambahkan bahwa barang-barang khas yang digunakan dalam perayaan Imlek bukan sekadar dekorasi atau sajian biasa.

Mereka mencerminkan harapan untuk memulai tahun baru dengan positif, sesuai dengan nilai-nilai budaya Tionghoa yang mengutamakan keharmonisan, keberuntungan, dan kebahagiaan.

"Tradisi ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara mengungkapkan harapan terbaik untuk tahun baru. Semua benda yang disiapkan punya makna mendalam yang menjadi doa tersendiri," tutup Yulius.. (nei,ist/dya)



Penembakan WNI ... (dari Hal 1)

JENAZAH Basri, korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), tiba di Terminal Cargo Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Riau, pada Rabu (29/1/2025), sekitar pukul 16.00 WIB. Peti jenazah berwarna putih yang terbungkus plastik tersebut disambut oleh anggota keluarga yang hadir di bandara. Setelah itu, jenazah Basri segera dimasukkan ke dalam ambulans untuk dibawa ke Pulau Rupat, Bengkalis.

Sepupu korban, Azrai, menyampaikan bahwa pihak keluarga menerima dengan lapang dada kepergian Basri. Jenazah korban rencananya akan dimakamkan pada hari yang sama. "Pemakaman tetap akan kami selenggarakan hari ini. Jenazah akan dibawa ke Jalan Nelayan, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis," katanya dikutip dari Antara.

Azrai juga mengungkapkan bahwa keluarga baru mengetahui kabar penembakan tersebut pada hari Jumat (24/1/2025). Bahkan, mereka tidak mengetahui bahwa Basri bekerja di Malaysia.

"Kami tak mengetahui lagi ke mana dia mencari kerja, bahkan komunikasi tidak ada. Anaknya juga tidak mengetahui," tambah Azrai.

Kejadian penembakan lima pekerja migran Indonesia ini terjadi pada Jumat (24/1/2025) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.

Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, dalam jumpa pers Minggu (26/1/2025), mengatakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) yang tengah berpatroli menemukan sebuah kapal yang ditumpang dan diawaki lima pekerja migran asal Indonesia.

Dalam kesempatan terpisah, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan berdasarkan informasi dari Polis Diraja Malaysia (PDRM), para pekerja migran Indonesia tersebut hendak keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal.

Berdasarkan informasi PDRM tersebut, Kemenlu juga sempat menyebut penembakan oleh APMM disebabkan aksi perlawanan dari para Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Satu orang meninggal. Sementara empat lainnya mengalami luka. Mengutip keterangan aparat negeri Malaysia, media-media negeri itu menyebut para pekerja migran sempat menabrakan kapal APMM sampai empat kali.

Para pekerja migran tersebut juga sempat disebut mencoba menyerang APMM menggunakan parang.

Keterangan ini berbeda dengan kronologi versi dua warga Indonesia. Mereka mengaku tidak melakukan perlawanan dengan senjata tajam.

Dalam keterangannya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, akan menindaklanjuti



Jenazah korban penembakan Otoritas Maritim Malaysia (APMM) di Perairan Tanjung Rhu atas nama Basri tiba di Kota Pekanbaru, Rabu (29/1/2025) pukul 16.00 WIB. (ant)

pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia terkait kasus penembakan WNI oleh polisi laut Malaysia.

"Kedatangan Pak Prabowo ke Malaysia kemarin menjadi fondasi yang akan saya tindaklanjuti dengan duduk bersama," ujar Cak Imin di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Rabu (29/1/2025).

Dia menjelaskan akan memanggil Menteri Luar Negeri, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Duta Besar Indonesia-Malaysia untuk duduk bersama membahas kasus penembakan WNI.

"Saya akan minta Menteri Perlindungan Pekerja Migran, kemudian Duta Besar, juga bantuan Kementerian Luar Negeri agar duduk bersama. Bicara detail legal maupun ilegal, kita buka mata, kita cari jalan," kata Cak Imin.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku sudah menghubungi Duta Besar Indonesia-Malaysia untuk pertemuan.

"Saya sudah kontak Duta Besar. Saya juga terus komunikasi dengan para pihak. Nanti secepatnya mem-follow up hasil pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Malaysia," jelasnya.

Lebih lanjut, Cak Imin mendorong pemerintah Malaysia mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan. Dia berharap peristiwa itu tidak terjadi lagi ke depannya.

Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan pihaknya mendorong otoritas Malaysia melakukan investigasi menyeluruh atas insiden ini, kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemenlu Indonesia, Judha Nugraha.

"Termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force)," kata Judha dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (29/1/2025).

KBRI Kuala Lumpur, menurutnya, masih terus mengumpulkan informasi lebih lengkap guna mendapatkan "konstruksi kejadian yang lebih jelas".

Mereka juga meminta retainer lawyer KBRI untuk mengkaji dan menyiapkan langkah hukum.

Kementerian Luar Negeri

Indonesia juga telah melakukan akses ke konsuleran pada Selasa (28/1/2025) guna menemui empat WNI korban yang sedang dirawat di Rumah Sakit Serdang dan Rumah Sakit Klang, Malaysia.

Dari keempat korban, dua WNI telah terverifikasi identitasnya, yaitu HA dan MZ, ungkapnya.

"Keduanya keduanya berasal dari Provinsi Riau," kata Judha.

HA dan MZ telah mendapatkan perawatan dan dalam kondisi stabil. Keduanya juga menjelaskan kronologi kejadian.

"Dan [HA dan MZ] menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM [Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia]," katanya.

Adapun dua korban lainnya masih berada dalam kondisi kritis pasca operasi dan belum dapat memberikan keterangan, tambah Judha.

Dugaan Extra Judicial Killing

Catatan Migrant Care sejak 2005 sampai 2025, sudah ada 75 pekerja migran Indonesia di tangan aparat Malaysia.

Direktur Migrant Care, Wahyu Susilo mengatakan 75 kasus kematian tersebut tergolong "extra judicial killing" atau pembunuhan oleh aparat tanpa proses peradilan.

Wahyu Susilo mengatakan kasus-kasus penembakan terdahulu didasari pada prasangka.

"Aparat otoritas bersenjata Malaysia yang menganggap pekerjaan migran sebagai 'indon' dan di dalam kosakata Melayu, indon itu lebih dekat pada pelaku jenayah atau pelaku kriminal," kata Wahyu.

Menurutnya hal ini menyebabkan suburnya praktik tindakan sewenang-wenang, meski para PMI yang tersangkut kasus belum diproses lewat lembaga peradilan.

Wahyu Susilo mengatakan investigasi perlu dilakukan oleh lembaga berwenang dari dua negara, termasuk juga komisi HAM di dua negara, yakni Komnas HAM dan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia.

Bahkan, menurutnya investigasi tersebut perlu dipantau oleh kelompok masyarakat sipil. Menurut Susilo pengusutan tuntas perlu

dilakukan agar aparat Malaysia tidak bertindak sewenang-wenang terhadap para PMI.

"Harus juga diinvestigasi agar para polisi atau otoritas bersenjata Malaysia itu tidak menikmati impunitas," kata Wahyu.

Alex Ong, aktivis Migrant Care di Malaysia, mengatakan stereotip kriminal juga melekat pada pekerja migran yang bekerja tanpa dokumen legal. Padahal, menurutnya dua hal tersebut berbeda.

"Kalau pendaatang tanpa izin, mereka itu hanya melanggar undang-undang imigrasi dan tidak berniat untuk melanggar undang-undang kriminal," kata Alex Ong.

Sindiket Penyelundupan Manusia?

Para WNI yang ditembaki aparat Malaysia di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, membocorkan satu nama yang diduga kuat menjadi pelaku penyelundupan pekerja migran ilegal dari dan menuju Malaysia. Sosok pelaku tersebut kerap disapa, Malik.

Nama Malik sendiri didapatkan pihak Kedutaan Besar RI di Malaysia berdasarkan wawancara langsung dengan dua WNI pekerja ilegal yang berada di kapal sasaran penembakan otoritas Malaysia itu. "Ada dua yang berhasil kami wawancara. Mereka menyebutkan membayar kurang lebih 1.500 Ringgit sampai 1.200 Ringgit (swkitar Rp 5 jutaan) kepada seseorang bernama Malik untuk pulang ke Dumai," ungkap Atase Polri di Malaysia Kombes (Pol) Juliarman Eka Putra Pasaribu, dikutip Rabu (29/1/2025).

Tidak hanya kedua WNI yang diwawancarai itu saja, ternyata ada sekitar 20 WNI pekerja ilegal lain di dalam kapal yang disasar peluru otoritas Malaysia itu.

Setelah meloloskan diri dari kejaran aparat, mereka menghilang entah ke mana. WNI orang yang terluka akibat tembakan mencari rumah sakit untuk pertolongan pertama. Juliarman melanjutkan, para WNI pekerja ilegal itu pun membayar kepada Malik untuk bisa masuk dan keluar dari Malaysia menggunakan jalur laur pada malam hari.

"Kalau dilihat dari status mereka, iya (korban penyelundupan orang). Tapi, mereka juga adalah para pekerja ilegal yang ingin pulang ke Tanah Air dan tidak menggunakan jalur resmi," ungkap Juliarman.

Kasus penyelundupan pekerja ilegal ini sendiri masih dalam penyelidikan otoritas Malaysia. Juliarman menyebut, Malaysia saat ini sedang menelusuri apakah Malik merupakan jaringan lama penyelundupan pekerja ilegal atau baru.

Juliarmen sekaligus memastikan pemerintah Indonesia melakukan pendampingan hukum terhadap para WNI pekerja ilegal yang diamankan otoritas Malaysia pascaperistiwa di perairan Tanjung Rhu itu. "Pasti kami akan mendampingi mereka, termasuk konsuler kedutaan untuk menjamin hak-hak mereka terlindungi," lanjut dia. (din wid, ant, ist, rls/dya)

Indonesia Hanya Punya 45 Hari Lengkapi Berkas Ekstradisi Paulus Tannos



Jejak Paulus Tannos di Kasus Korupsi e-KTP

- Ia merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, perusahaan yang ikut terlibat di proyek pengadaan e-KTP.
- Perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium PNRI itu berhasil meraup keuntungan bersih mencapai Rp145,8 miliar.
- Penetapan Paulus Tannos sebagai tersangka oleh KPK sendiri terjadi sejak tahun 2019. Ada dugaan ia melakukan kongkalikong dalam proyek pengadaan tersebut. Kesepakatan tersebut diduga dilakukan sebelum proyek dilelang.
- Nama Paulus masuk ke Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK sejak 19 Oktober 2021.
- Paulus sendiri sempat dipanggil oleh KPK pada 24 September 2021 dengan status sebagai tersangka. Sayangnya sejak penetapan Paulus sebagai tersangka, ia justru kabur ke luar negeri.
- Di tahun 2023, KPK berhasil melacak keberadaannya. Setidaknya ada dua negara yang pernah disinggahi oleh Paulus selama menjadi DPO yakni di Thailand dan di salah satu negara Afrika. Namun kala itu KPK tidak bisa menangkapnya begitu saja karena beberapa alasan. Penggantian identitas dan kewarganegaraan jadi salah satu kendala KPK menangkap Paulus.
- KPK akhirnya berhasil menangkap Paulus pada 24 Januari 2025



JAKARTA- Paulus Tannos, buron kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP, berhasil ditangkap di Singapura. Pemerintah Indonesia diberi waktu 45 hari untuk melengkapi berkas sebagai syarat ekstradisi. Tenggat itu akan berakhir pada 3 Maret mendatang.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah akan berupaya mempercepat proses ekstradisi tersangka korupsi e-KTP, Paulus Tannos. Kementerian Hukum telah membentuk tim kerja bersama dengan aparat penegak hukum dan kementerian lain yang berwenang dalam proses ekstradisi tersebut.

Tim kerja itu terdiri dari Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) Ditjen AHU Kementerian Hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Kejaksaan Agung dan Kementerian Luar Negeri.

"Saat ini tim sudah ada timeline yang disepakati bersama," kata Supratman dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (29/1/2025). "Saya yakin dan percaya dalam waktu yang singkat hal tersebut bisa dipenuhi," tambahnya.

Pada Kamis (23/1/2025) lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkonfirmasi penangkapan buron korupsi e-KTP Paulus Tannos di Singapura. DPO tersangka KPK sejak 2019 tersebut sedang menjalani sidang ekstradisi di negeri singa itu.

"Benar saat ini sedang ada proses ekstradisi untuk tersangka inisial PT," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto.

Dua Kali Ubah Kewarganegaraan
Menteri Hukum Andi Supratman

Andi Agtas mengatakan Paulus berstatus WNI karena aturan di Indonesia tak bisa melepaskan status kewarganegaraan. Dia menuturkan Paulus sebelumnya berupaya melakukan perubahan status kewarganegaraan sebanyak dua kali.

"Kami terima bahwa yang bersangkutan juga memiliki status kewarganegaraan negara sahabat, namun berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM bahwa untuk lepas kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis," kata Supratman dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (29/1/2025).

Pada 2023, Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik sudah mengendus keberadaan Paulus Tannos di sebuah negara. Tapi tidak dirinci, di mana Tannos ditemukan, yang dijelaskan hanya Tannos sudah berganti kewarganegaraan.

"Paulus Tannos sebagaimana yang sudah kami sampaikan, KPK sudah menemukannya di luar negeri, kami tidak perlu menyebutkan negaranya, dan kemudian ternyata yang bersangkutan sudah berganti identitasnya dan paspor negara lain di wilayah Afrika Selatan," kata Ali melalui keterangan resminya.

Paulus Tannos merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra. Perusahaan itu menjadi pemenang dalam tender proyek e-KTP pada 2011. Selain PT Sandipala, ada juga perusahaan lainnya yang tergabung dalam konsorsium yakni PT Sucofindo, PT LEN, dan PT Quadra Solution. Keempat perusahaan swasta itu dikomandoi oleh Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai koordinator konsorsium.

Perkara korupsi e-KTP ini sudah ditangani KPK sejak 2016 silam. Akibat korupsi berjamaah ini, negara mengalami kerugian mencapai Rp 2,3 triliun.

Para terdakwa yang telah dihukum dalam kasus ini di antaranya mantan Ketua DPR Setya Novanto dan beberapa mantan pejabat Kemendagri, serta pihak swasta. Paulus Tannos merupakan tersangka baru yang ditetapkan KPK pada 13 Agustus 2019 berdasarkan hasil pengembangan kasus.

Bersama Tannos, pada 2019 mantan anggota DPR, Miryam S Hariyani; mantan Dirut PNRI Isnu Edhi Wijaya dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan E-KTP Husni Fahmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

KPK menyatakan Paulus Tannos berperan penting dalam kongkalikong pengerjaan proyek e-KTP. Dia disebut melakukan beberapa pertemuan dengan sejumlah vendor termasuk dengan tersangka Husni dan Isnu untuk merekayasa proyek E-KTP. Pertemuan itu, disebut KPK, menerbitkan peraturan yang bersifat teknis, bahkan sebelum proyek dilelang.

Selain itu, KPK menduga Tannos juga melakukan pertemuan dengan sejumlah tersangka lainnya untuk menyepakati besaran fee 5 persen sekaligus skema pembagian fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat pada Kementerian Dalam Negeri. Menurut fakta sidang, perusahaan Tannos diperkaya Rp 145,85 miliar dalam proyek ini.

"Di situ juga disepakati fee sebesar

5 persen sekaligus skema pembagian beban fee, yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR dan pejabat Kemendagri," kata Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Saut Situmorang, pada 13 Agustus 2019.

Namun KPK gagal memeriksa dan menangkap Tannos, karena sebelum ditetapkan tersangka, Tannos dan keluarganya telah meninggalkan Indonesia dan memilih menetap di Singapura pada 2017. Sejak 2019 KPK telah menetapkan Tannos dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). (wid, rls, ist, ant/dya)